



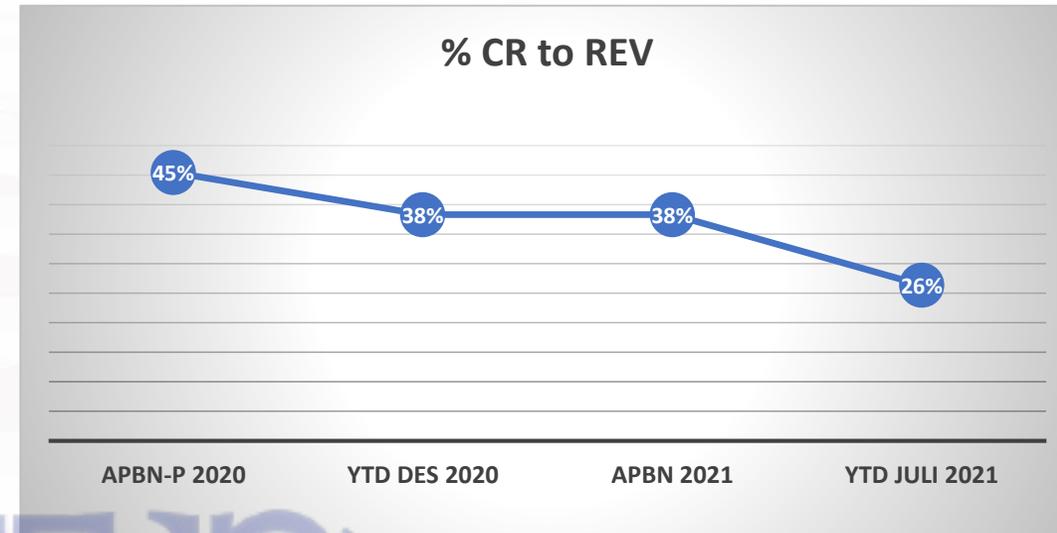
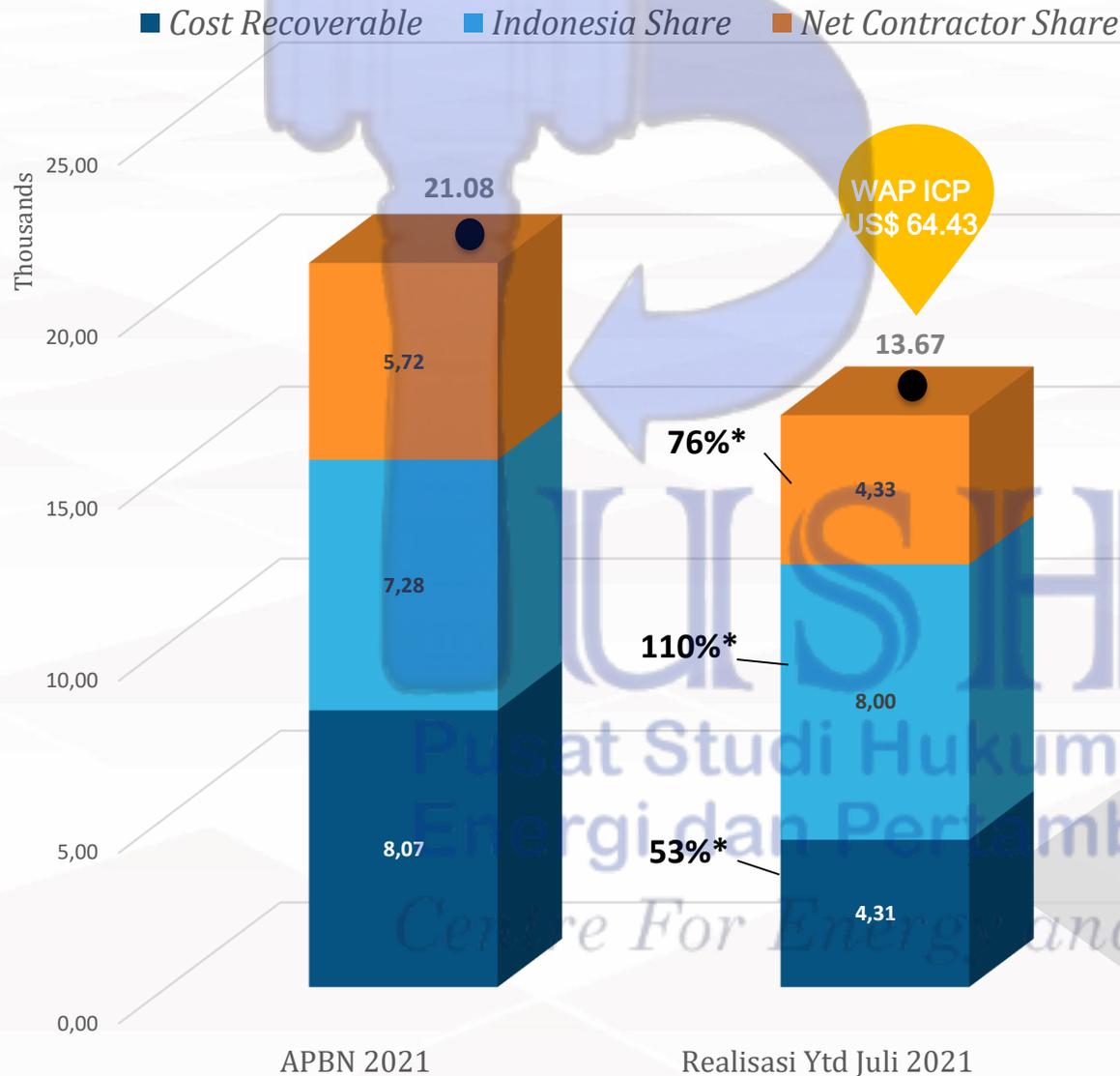
# 03 *EVALUASI COST RECOVERY* & OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan  
*Centre For Energy and Mining Law*



# Capaian Kinerja Keuangan YTD Juli 2021

## Distribusi Revenue

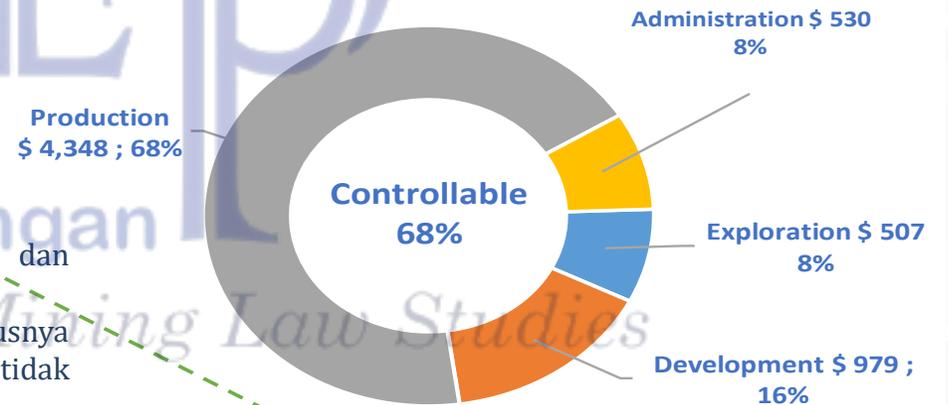
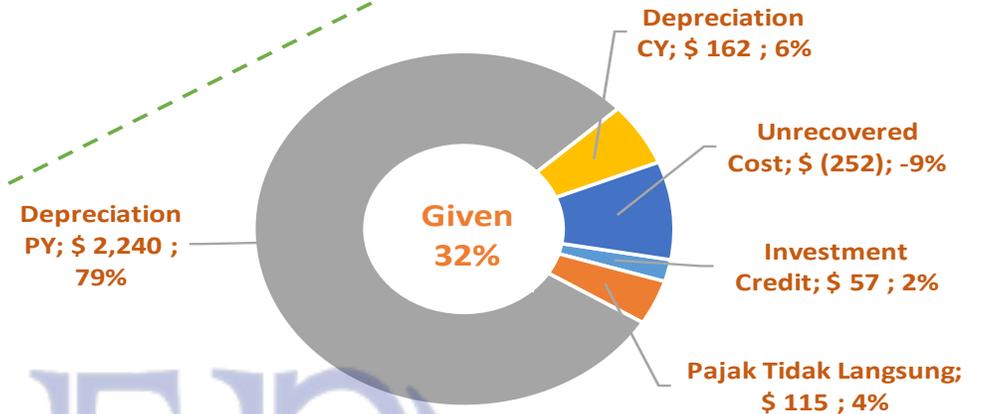
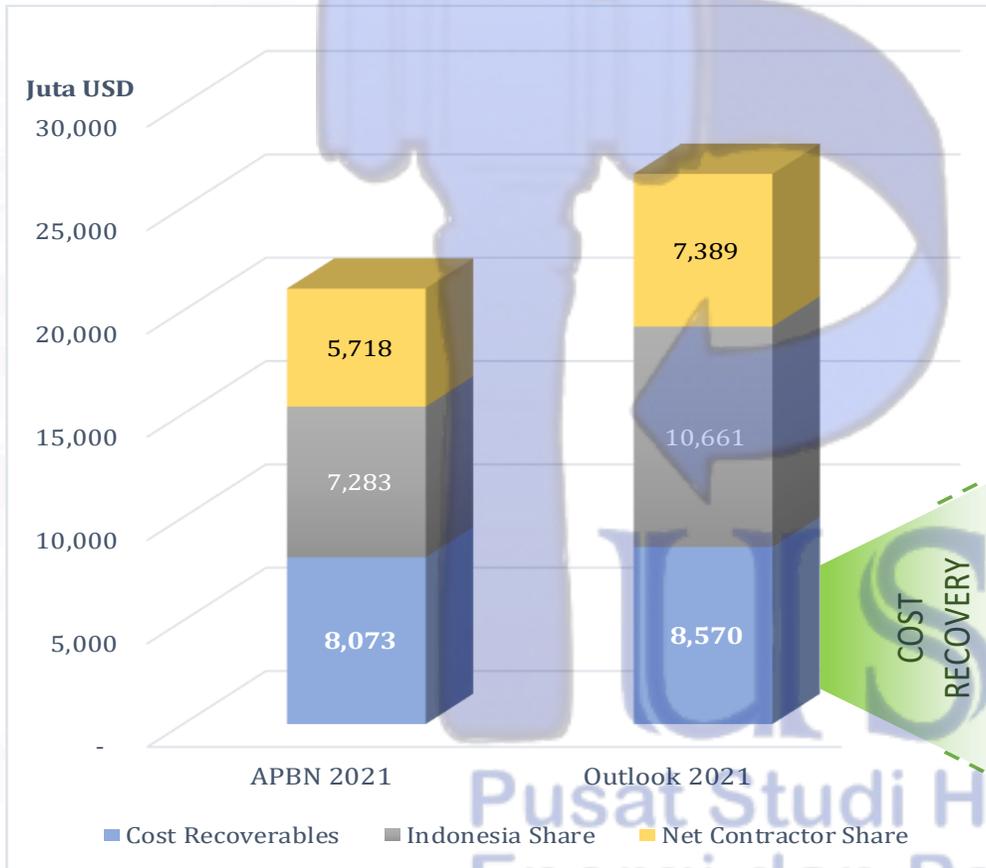


Current Year Operating Cost, 75%

Prior Year Operating Cost, 25%

Note: \* Prosentase terhadap APBN 2021  
 Realisasi Ytd Juli 2021 berdasarkan data Key Info per 5 Agustus 2021

# Komponen Cost Recovery – FY Outlook 2021



- 1) Nilai *Outlook Cost Recovery* US\$ 8,57 Miliar termasuk Pajak-Pajak tidak langsung , sewa BMN dan Second Escrow Account CPI Rokan sebesar **USD498 juta**.  
**Cost Recovery** yang beratribusi secara langsung terhadap kegiatan hulu migas Migas seharusnya meliputi biaya – biaya eksplorasi dan eksploitasi kegiatan usaha hulu migas diluar Pajak-Pajak tidak langsung , sewa BMN dan *Second Escrow Account* CPI Rokan
- 2) Penerimaan Negara US\$ 10.66 Miliar termasuk penyesuaian harga gas sebagai implementasi Kepmen ESDM atas penetapan harga gas untuk industri tertentu dan listrik.

# Menjawab beberapa pandangan yang kurang tepat tentang Cost Recovery



## **Cost Recovery** Merupakan Insentif

**Cost Recovery**

≠ insentif dari Pemerintah kepada Investor

= pemerintah **mengembalikan modal** yang sudah dikeluarkan investor dengan **mengurangi pendapatan negara**, bukan dengan **mengembalikan uang ke investor**

- ☑ Pengembalian terjadi hanya jika **eksplorasi berhasil** dan **berproduksi secara komersil**
- ☑ Artinya, seluruh **risiko tinggi** hulu migas **ditanggung investor**
- ☑ **Pasal 3 ayat 1 & 2, PP 27/2017:**  
Kontraktor wajib membawa modal & teknologi serta **menanggung risiko** dalam rangka pelaksanaan Operasi Perminyakan berdasarkan **Kontrak Kerja Sama** dan ditakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas & efisiensi, kewajaran, serta kaidah praktek bisnis & keteknikan yang baik



## Semua **Biaya Kontraktor** di-cover Negara

- ☹ Biaya kontraktor tidak 'diganti' oleh Negara, tetapi **dikembalikan\*** dari penerimaan hasil produksi blok migas bersangkutan.  
*\*pengembalian tanpa bunga dan hanya pengeluaran yang jauh sebelumnya sudah disetujui & diaudit pemerintah*
- ☹ Apabila eksplorasi **tidak menemukan cadangan** atau tidak dapat berproduksi secara komersial, maka **tidak ada cost recovery** dan 100% beban menjadi tanggungan rugi investor.

# Alur Proses Monitoring *Cost Recovery*

## PERENCANAAN & PENGADAAN



## OPERASI / DUKBIS



## KEUANGAN



## AUDIT



### SISTEM INTEGRASI POD, WP&B & AFE PENGADAAN

- Data terintegrasi mulai dari POD, WP&B dan AFE serta Pengadaan yang bisa diakses seluruh fungsi
- Evaluasi pelaksanaan Kontrak
- I-Cost Database

### PELAKSANAAN & MONITORING RKA

- Memastikan pelaksanaan RKA
- *Policy* dan *clarity business Process*
- Evaluate *Monthly Report & Quarterly Report*
- Database penyelesaian pekerjaan

### DATA INTEGRITY & COST CONTROL

- *Data Validity and Reliability*
- Database yang terintegrasi dengan POD/WP&B/AFE, kontrak Pengadaan, penyelesaian pekerjaan
- *Minimizing Change Order & Budget Overrun*

### TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

- Database Hasil Audit
- "Medical Report KKKS"

# Upaya Monitoring & Evaluasi *Cost Recovery*

Monitoring atas biaya *sunk cost* KKKS Eksplorasi yang sudah POD

Monitoring atas realisasi biaya Proyek/AFE

Audit Biaya Operasi atas KKKS Eksploitasi dan penurunan saldo temuan

Monitoring atas realisasi pembebanan biaya operasi dan pelaksanaan program kerja KKKS Eksploitasi melalui analisa dan evaluasi FQR

Memastikan penutupan seluruh asuransi aset (*operational* dan *well control*), aset LNG, proyek konstruksi dan aset non-industri

Memastikan jumlah setoran dana ASR sesuai dengan pembahasan WP&B 2021

Memastikan pelaporan Aset BMN KKKS atas biaya Depresiasi untuk stakeholders



# Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara



- Optimalisasi Penerimaan Negara melalui manajemen over/(under) lifting dengan menyediakan perhitungan prognosis penerimaan negara *dan* data outlook perhitungan bagi hasil untuk stakeholder

- Evaluasi kemampuan dan risiko finansial untuk aktivitas penjualan minyak dan gas bagian negara serta evaluasi finansial pada lelang WK, pengalihan interes, dan perpanjangan KKS serta kegiatan hulu migas lainnya.

- Monitoring atas realisasi perhitungan bagian negara atas KKKS Eksploitasi dan permintaan kepada KKKS untuk penyelesaian pembayaran setelement Overlifting KKKS serta kewajiban KKKS lainnya

- Monitoring penerimaan negara dari pajak berupa perhitungan Corporate dan Dividend Tax (PPh Migas) dan pajak - pajak tidak langsung kegiatan usaha hulu migas dari operator KKKS

- Evaluasi SAA MMKBN dengan penyesuaian tugas dan tanggung jawab penjual migas bagian Negara

# Continuous Improvement

## OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA



### NEW PARADIGM PENERIMAAN NEGARA

Membangun  
Networking dan  
proaktif mengajak  
diskusi dengan  
Stakeholders



### PENYELARASAN REGULASI

FGD antar kementerian  
membahas stimulus hulu  
migas untuk  
meningkatkan iklim  
investasi



### MASIH DIPERLUKAN REVISI PERATURAN PP 27 & PP 53

Belum efektif dijalankan  
mengingat terdapat  
pasal yang perlu direvisi  
untuk mendukung  
keekonomian KKKS



### SOT INTERKONEKSI

Kurangnya dukungan dari  
IT Kemeneterian  
Keuangan dalam  
pengembangan SOT  
Interkoneksi

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN TEKNIS OPTIMALISASI HULU MIGAS

Sinergi kebijakan dan berbagai instrument diperlukan sehingga output/outcome terhadap perekonomian optimal

## LANGKAH DAN KEBIJAKAN HULU MIGAS

- **Penyederhanaan dan Kemudahan Perizinan** untuk Menarik dan Meningkatkan Investasi Hulu Migas yang fokus pada kegiatan Eksplorasi.
- **Pengendalian Biaya Operasional** Kegiatan Usaha Hulu Migas yang lebih efektif dan efisien.
- **Penyempurnaan Kontrak Bagi Hasil** yang lebih menarik bagi investor sesuai dengan ketentuan
- **Penyempurnaan regulasi dan peningkatan kepastian hukum** dengan tetap menghormati Kontrak eksisting.
- **Peningkatan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi** hulu migas
- **Pelaksanaan kebijakan dan regulasi Pemerintah atas penerimaan hulu migas sebagai *Economic Booster* atau *Economic Driven***, seperti Perpres Nomor 40/2016 Jo. Perpres 121/2020.

*Improving Existing Asset Value/Maintaining Base Production*

*R to P Acceleration*



*Massive Exploration*

*Enhanced Oil Recovery (EOR)*

**Multiplier Effect**

- **Meningkatkan Penerimaan Negara**
- **Mengurangi Impor Migas**
- **Menciptakan Lapangan Kerja**
- **Menumbuhkan Industri Nasional**

**Pengelolaan Biaya Operasi Efektif & Efisien**

**Peningkatan Kualitas Dan Iklim Investasi Hulu Migas**

Sumber : BKF, 2021  
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (*KEM PPKF*) Tahun 2022

*"Don't wait for the ideal time to do something." - Anonymous*

**Thank You**



Pusat Studi Hukum dan Energi dan Pertambangan  
Centre For Energy and Mining Law Studies  
Desti Melanti  
Accounting Division – SKK Migas